

Analisis Strategi Perlawanan Indonesia Dalam Diskriminasi Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa

M. Fuadillah Nugraha

Magister Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Email: fuadnugraha6@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how Indonesia's resistance strategy in oil palm discrimination by the European Union. Researchers use the perspective of liberalism and idealism, and the basic assumptions are peace and war avoidance. The results show that EU discrimination against Indonesian CPO products requires players in the palm oil industry and the Indonesian government to work together to design and develop intensive diplomatic efforts aimed at the EU government and its people. The Indonesian government's efforts to oppose the EU's incentives for the use of palm oil are 1) filing claims and challenges against the EU incentives to reject palm oil restrictions, 2) The Indonesian government emphasizes the importance of distributing Indonesian palm oil globally 3) Lobbying the leadership of the APEC organization to ensure the safety of Indonesia's palm oil industry 4) Undertake Join Capaign efforts by the world's largest palm oil producer to protect the stability of palm oil shipments and take action against negative campaigns against palm oil, and unite voices in drafting an agreement to jointly support industrial development palm oil to be more resilient against the global backlash on palm oil.

Keywords: *Discrimination, Oil Palm, Strategy, Resistance.*

Abstrak

Riset diselenggarakan dengan maksud untuk menemukan bentuk strategi perlawanan Indonesia pada diskriminasi atau pembatasan kelapa sawit oleh Uni Eropa. Peneliti menggunakan perspektif liberalisme dan idealisme, dan asumsi dasarnya adalah perdamaian dan penghindaran perang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Diskriminasi UE terhadap produk CPO Indonesia mewajibkan pemain di perindustrian minyak kelapa sawit dan pemerintah Indonesia untuk bergotong royong merancang serta mengembangkan usaha diplomatik intensif yang ditujukan kepada pemerintah UE dan rakyatnya. Usaha pemerintah Indonesia dalam menentang insentif UE atas pemakaian minyak sawit ialah 1) melakukan pengajuan klaim dan gugatan terhadap insentif UE untuk menolak pembatas minyak kelapa sawit, 2) Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pendistribusian minyak sawit Indonesia di lingkup dunia 3) Melaksanakan lobi terhadap pimpinan organisasi APEC untuk memastikan keamanan industri kelapa sawit Indonesia 4) Melakukan upaya Join Capaign oleh produsen minyak sawit

terbesar di dunia untuk melindungi stabilitas pengiriman minyak kelapa sawit dan mengambil tindakan terhadap kampanye negatif atas minyak sawit, serta menyatukan suara dalam menyusun kemufakatan untuk bersama-sama mendukung pengembangan industri sawit agar lebih tangguh dalam melawan serangan balik global atas minyak kelapa sawit.

Kata Kunci: Diskriminasi, Kelapa Sawit, Strategi, Perlawanan.

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dinyatakan sebagai negara terbesar dalam menghasilkan minyak sawit.¹ Di Indonesia, minyak sawit dianggap bak berlian kuning. Selain itu, minyak sawit telah menjadi salah satu bahan dasar terpenting sejak tahun 1970-an². Di tengah kelangkaan energi, kelapa sawit menjadi pilihan lain. Daripada itu, kelapa sawit juga mempunyai peran yang krusial dalam beragam industri pangan maupun non pangan.³ 80% minyak sawit dipergunakan sebagai industri pangan, 19% untuk industri kosmetik, dan 1% sisanya digunakan di pabrik biodiesel untuk memenuhi kebutuhan energi terbarukan.⁴ Keseluruhan dari penggarapan minyak sawit dunia ditaksir mencapai lebih dari 45 juta ton, dan Indonesia serta Malaysia menjadi penggarap dan eksportir terbesar di dunia⁵. Negara Indonesia menyumbang 47,6% dari keseluruhan penggarapan minyak sawit dunia.⁶ Indonesia memiliki 8,4 juta hektar ladang minyak sawit. Menurut catatan GAPKI, 52% dijalankan oleh perusahaan swasta, 42% oleh pohon kelapa sawit, dan 6% oleh perusahaan milik Negara.⁷

¹ Otto Hospes, "Marking the Success or End of Global Multi-Stakeholder Governance? The Rise of National Sustainability Standards in Indonesia and Brazil for Palm Oil and Soy," *Agriculture and Human Values*, 2014, <https://doi.org/10.1007/s10460-014-9511-9>.

² Mohamad F. Hasan and Michael R. Reed, "An Analysis Of Factors Determining Competitiveness: The Case Of The Indonesian Palm Oil Industry," *Jurnal Agro Ekonomi*, 2016, <https://doi.org/10.21082/jae.v19n1.2001.1-17>.

³ Nuryanti.s, "Nilai Strategis Industri Sawit," *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 2008.

⁴ M. K. Swandi, Periadnadi, and Nurmiati, "Isolasi Bakteri Pendegradasi Limbah Cair Industri Minyak Sawit," *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 2015.

⁵ Syahril et al., "Does the World Price of Crude Palm Oil and Total of Production Determine Palm Oil Marketing Margins in Indonesia," *Industrial Engineering and Management Systems*, 2020, <https://doi.org/10.7232/iems.2020.19.3.520>.

⁶ Rodrigo Goyena and A.G Fallis, *Analisis Daya Saing Kelapa Sawit (CPO) Indonesia Di Pasar Internasional*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.

⁷ M Hudori, "Perbandingan Kinerja Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Citra Widya Edukasi*, 2017.

Arah atau tujuan terbesar dari pengeskoran minyak sawit kedua dari Negara Indonesia merupakan Uni Eropa pada tahun 2012 dan merupakan sumber penghasilan terbesar ketiga Indonesia⁸. Selama lima tahun terakhir, perdagangan bipartisan telah tumbuh 8,5% setiap tahun. Pada 2013, keseluruhan transaksi Indonesia-Uni Eropa meraih \$ 31,8 miliar, turun 0,9 persen dari \$ 32,1 miliar pada 2012. Ekspor Indonesia ke Uni Eropa mencapai \$ 18,1 miliar pada 2013, naik 0,6 persen dari tahun 2012 menjadi \$ 18 miliar. Bahan baku ekspor utama adalah hasil pertanian, terlebih minyak sawit beserta turunannya.⁹

Uni Eropa yang beranggotakan 28 negara (EU-28) adalah pasar ekspor minyak sawit tertinggi kedua di Indonesia. Pada 2013, pengiriman ke luar negeri kelapa sawit Indonesia kepada Uni Eropa meraih 3.730.000 setiap ton dengan nominal \$ 2,85 miliar.¹⁰ Permintaan minyak sawit di Eropa tinggi. Eropa memerlukan 6 juta ton minyak sawit setahun.¹¹ Indonesia cuma bisa mengirimkan 2,5 juta ton. Amerika Latin masih menjadi pemasok minyak sawit tertinggi di Eropa.¹²

Kurangnya data pengiriman minyak mentah Indonesia kepada Uni Eropa, membuat Pemerintah mengindikasikan adanya *black campaign* yang mengaitkan antara minyak sawit dengan kesehatan juga lingkungan¹³. Masalah ini akan semakin mempersulit produk sawit Indonesia, terutama CPO (*crude palm oil*) atau minyak sawit mentah untuk masuk ke Uni Eropa apalagi dengan adanya EU

⁸ Yose R. Damuri and Creina Day, "Survey of Recent Developments," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 2015, <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1016565>.

⁹ Bustanul Arifin and Komang Audina Permana Putri, "Indonesian Government Strategies On Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access To European Union Countries Over The EU Parliament Resolution On Palm Oil And Deforestation Of Rainforest," *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 2019, <https://doi.org/10.25077/ajis.8.2.201-221.2019>.

¹⁰ Windratmo Suwarno, "The Challenge of Indonesian Diplomacy Against Palm Oil Discrimination," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2019, <https://doi.org/10.26593/jihi.v15i2.3416.197-212>.

¹¹ Achmad et al., "Collaborative Governance in Renewable Energy Utilization," *International Journal of Science and Society*, 2020.

¹² Verdinand Robertua, "Environmental Diplomacy: Case Study of the Eu-Indonesia Palm Oil Dispute," *Mandala Jurnal Hubungan Internasional*, 2019.

¹³ Adam Tyson and Eugenia Meganingtyas, "The Status of Palm Oil under the European Union's Renewable Energy Directive: Sustainability or Protectionism?," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 2020, <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1862411>.

Directive tentang emisi gas rumah kaca pada tahun 2011.¹⁴ Hal ini disebabkan minyak sawit mengeluarkan karbon lebih banyak dibandingkan minyak jenis lain, sama halnya dengan minyak biji bunga matahari, yang memperparah dampak rumah kaca global.¹⁵ Selain itu, terkait dengan kelanjutan peningkatan kelapa sawit, khususnya peningkatan lahan subur dan proses pembuatan. Begitu pula permasalahan lingkungan terkait pengalihan pemanfaatan hutan alam serta tanah gambut menjadi ladang kelapa sawit. Masalah ini selanjutnya disambungkan dengan deforestasi, punahnya keanekaragaman hayati, dan kebakaran hutan dan padang rumput. Masalah-masalah ini bertentangan dengan pernyataan pemerintah Indonesia. Sebagai pengirim kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia mempunyai kapasitas pasar yang besar di Eropa, tetapi Indonesia tidak mampu mengejar kepentingan nasionalnya di bidang-bidang tersebut. Bersamaan dengan itu, Uni Eropa tidak memiliki regulasi yang sama dengan minyak sawit Prancis dan Amerika Latin¹⁶.

Diplomasi ekonomi sangat terkait dengan problematika ekonomi yang ditangani suatu negara dengan negara lainnya ataupun organisasi berbeda namun relevan secara politik.¹⁷ Diplomasi ekonomi terkait erat dengan urusan internal berbagai kalangan bisnis atau negara yang terkena dampak bisnis.¹⁸

Woolcock (2012) mendeskripsikan bahwasanya dalam hubungan diplomatik ekonomi, pemerintah mempertemukan tiga jenis ketegangan, yaitu (1) ketegangan politik dan ekonomi. (2) ketegangan antara tekanan dalam negeri dan luar negeri;

¹⁴ Balu Nambiappan et al., "Malaysia: 100 Years of Resilient Palm Oil Economic Performance," *Journal of Oil Palm Research*, 2018, <https://doi.org/10.21894/jopr.2018.0014>.

¹⁵ Arifin and Putri, "Indonesian Government Strategies On Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access To European Union Countries Over The EU Parliament Resolution On Palm Oil And Deforestation Of Rainforest."

¹⁶ Christine Overdeest and Jonathan Zeitlin, "Experimentalism in Transnational Forest Governance: Implementing European Union Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Voluntary Partnership Agreements in Indonesia and Ghana," *Regulation and Governance*, 2018, <https://doi.org/10.1111/rego.12180>.

¹⁷ A B Habibie, "Strategi Indonesia Dalam Mengatasi Black Campaign Sawit Untuk Meningkatkan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Periode Tahun 2007-2012," *Global Dan Policy*, 2016.

¹⁸ Arus Reka Prasetia, "Nation Branding: Komunikasi (Kenegaraan) Atau Komunikasi Pemasaran?," in *Conference on Communication and New Media Studies: Peran Dan Kontribusi Kajian Komunikasi Dalam Era Komunitas ASEAN*, 2015, <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3692.2960>.

(3) ketegangan antara pemerintah dan bisnis lain, termasuk bisnis swasta dan organisasi non-pemerintah. Dalam bentuk pertama, persoalan sawit bukan hanya persoalan ekonomi, tapi yang terpenting persoalan politik. Dalam hal ini, dampak kebijakan Uni Eropa terhadap negara-negara penghasil kelapa sawit.

Ketegangan dan desakan internasional akan memperburuk situasi internal negara. Dalam hal ini, upaya Parlemen Eropa untuk melancarkan kampanye negatif menjadi perhatian yang besar bagi pelaku usaha Indonesia, khususnya pelaku usaha kelapa sawit. Kampanye negatif ini tidak hanya mempengaruhi situasi ekonomi di Indonesia, tetapi juga reputasi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kebijakan lingkungan. Dalam diplomasi ekonomi Okano-Heijmans (2011) menjelaskan sebagai berikut,

“Economic diplomacy involves both the 'end of business' and the 'end of power-play', and all the tools (in a mirror view: expression) of economic diplomacy can be placed somewhere between these two extremes. It turns out that the two ends of the specter can be directly related to the two main determinants of the balance of national interests namely, economic prosperity on the one hand and political stability and national security on the other. It also reflects the idea that economic power involves various forms of power.”

Dalam kajian ini, hubungan diplomatik mencakup kategori-kategori bisnis komersial kelapa sawit di bangsa-bangsa Eropa. Diplomasi mengarah ke pertanyaan tentang peran pemerintah dalam mempromosikan kepentingan nasional dan kepentingan ekonomi. Peran bisnis dan pemerintah krusial dalam mendorong kesejahteraan ekonomi pada salah satu pihak dan kestabilan nasional di sisi lain. Dalam kaitan ini, diplomasi ekonomi akan menunjukkan kekuatan ekonomi dalam mengembangkan kepentingan nasional Indonesia.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif liberalisme dan idealisme, dan asumsi dasarnya adalah perdamaian dan penghindaran perang. Menurut kaum liberal, perdamaian adalah masalah umum negara: dalam kata-kata Kant, perdamaian bersifat stabil.

¹⁹ Jevon Natashya, “Hambatan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia Ke Uni Eropa Pasca Kebijakan Renewable Energy Directive (RED),” *Jurnal Sentris*, 2020, <https://doi.org/10.26593/sentris.v2i2.4185.127-155>.

Teori hubungan internasional liberal timbul akibat adanya Perang Dunia I sebagai tanggapan atas ketidaksanggupan negara dalam mengendalikan dan meminimalisir perang dalam hubungan internasional mereka. Penganut pertama teori ini yaitu Woodrow Wilson dan Normal Angell, yang berpendapat dalam bermacam strategi bahwa negara-negara diuntungkan satu sama lain melalui kerja sama.

Era idealisme dimulai pada 1920-an dan 1930-an dengan keinginan kuat untuk menghindari perang. Salah satu pendiri idealisme terkenal itu adalah Wilrow Wilson, yang termasuk dalam empat belas artikel Wilson. Awal idealisme adalah setelah Perang Dunia I. Menurut Wilson, perdamaian bukanlah hal yang wajar, tetapi harus diciptakan. Wilson mengatakan perdamaian lebih lanjut dapat dicapai melalui pelembagaan. Konsep penting dari pemikiran idealis adalah keamanan kolektif yang biasa disebut *collective security*. Sebab bilamana keamanan suatu negara terganggu maka akan berdampak pada stabilitas keamanan negara. Sehingga sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan keamanan suatu kawasan. Hal itulah yang disebut dengan *interconnectedness*.

Teori liberalisme dibagi menjadi empat tarekat: liberalisme sosiologis, liberalisme interdependen, liberalisme institusional, dan liberalisme republik. Liberalisme sosiologis, dalam studi hubungan internasionalnya, menolak anggapan bahwa pemerintahan yang berdaulat tidak hanya dikenal sebagai aktor, tetapi juga sebagai hubungan yang saling bergantung antara aktor dan individu lain, seperti individu, kelompok, dan asosiasi swasta. menjadi kooperatif. Dari perspektif liberalisme yang saling bergantung, kesejahteraan dipandang sebagai alat yang lebih berguna daripada keamanan, sehingga interaksi cenderung kolaboratif. Organisasi liberal percaya bahwa lembaga internasional mempromosikan kerja sama dan mengurangi ketidakpercayaan antar negara. Akhirnya, karena liberalisme Republik percaya bahwa demokrasi liberal cenderung menyelesaikan konflik secara damai, banyak negara yang menganut demokrasi liberal cenderung menciptakan dunia yang damai.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *retroductive* dimana penelitian ini memperoleh sumber dari konstruksi sosial membentuk pandangan terhadap sebuah fenomena. Digunakan untuk memahami sebab-akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. Untuk menjelaskan fenomena tanpa harus melihat realitas yang berjalan, dapat melalui konstruksi sosial. Data dalam penelitian didapatkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu jenis pengumpulan data deskriptif melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, berita, dan media elektronik (internet). Sedangkan untuk analisis datanya, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dan teknik penulisan deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Diskriminasi Uni Eropa terhadap produk CPO Indonesia mewajibkan pelaku yang bergerak di perindustrian minyak kelapa sawit dan pemerintah Indonesia untuk bergotong royong merancang serta mengembangkan usaha diplomatik intensif yang ditujukan kepada pemerintah UE dan rakyatnya.²⁰ Salah satu usaha persuasif Indonesia yaitu dengan mengadakan konferensi internasional tentang hal tersebut dengan topik "*Eradicating Poverty through the Agricultural and Plantation Industry to Empower Peace and Humanity* " di Pontifical Urbana University di Roma, Italia.²¹ Konferensi ini adalah forum terbuka yang merupakan peluang yang penting bagi dialog secara intelektual dan transparan antara Indonesia dengan seluruh pihak yang terlibat di industri CPO baik Indonesia maupun Eropa. Pemerintahan Indonesia berupaya untuk semakin terbuka dalam menyikapi problematika lingkungan terkait ekspansi dan pengembangan sektor turunan kelapa sawit dan CPO. Upaya lain adalah pemerintah Indonesia mengembangkan standar berkelanjutan untuk produksi minyak sawit yang juga harus dipatuhi oleh industri minyak sawit dengan skema sertifikasi pada negara-negara tujuan ekspor, terlebih pasar Eropa. Meningkatnya kebakaran hutan dan tanah perkebunan pada tahun 2015 menjadi alasan utama industri kelapa sawit

²⁰ Cordula Hinkes, "Adding (Bio)Fuel to the Fire: Discourses on Palm Oil Sustainability in the Context of European Policy Development," *Environment, Development and Sustainability*, 2020, <https://doi.org/10.1007/s10668-019-00541-y>.

²¹ Suwarno, "The Challenge of Indonesian Diplomacy Against Palm Oil Discrimination."

Indonesia mendapat tuduhan dari Uni Eropa dengan alasan tidak ramah lingkungan. Banyaknya hutan yang disusupi pembakaran untuk memperluas perkebunan kelapa sawit dilakukan bukan hanya oleh petani namun juga oleh korporasi, sehingga terbakarnya hutan dan areal yang luas dapat mengakibatkan punahnya beberapa jenis tumbuhan dan satwa.

Pada sisi yang berbeda, pertumbuhan dan pengembangan lahan subur dan industri kelapa sawit memiliki peran yang penting dalam penanggulangan kemiskinan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia. 41% dari keseluruhan luas 11,26 juta hektar pohon kelapa sawit dikendalikan oleh 2,3 juta petani kecil. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup para petani kelapa sawit tercermin dari kinerja mereka untuk menghidupi diri sendiri dan berhenti bergantung pada kredit pinjaman bank.

Daya tarik ini akan menambah luas areal budidaya kelapa sawit secara individual, karena panen rutin pohon kelapa sawit setiap dua minggu akan berdampak signifikan pada penguatan kapasitas ekonomi mereka. Sebagai produsen utama minyak sawit, Indonesia berinisiatif untuk bekerjasama dengan Malaysia untuk memerangi diskriminasi kebijakan minyak nabati berdasar biji-bijian di Eropa.

Berdasarkan paparan fakta dan data yang telah dikumpulkan, didapati bahwa argumen lahan pertanian dan tanaman kelapa sawit banyak memanen hutan tidak berdasar dibandingkan dengan tanaman minyak nabati berbasis biji-bijian. Kontribusi penanaman kelapa sawit terhadap deforestasi hutan sekitar dua persen dibandingkan dengan minyak nabati berbasis biji-bijian lainnya di kawasan Eropa. Hal ini sangat mungkin terjadi dalam hal perbandingan tutupan atau cakupan luas tanaman kelapa sawit, yang jauh lebih luas daripada minyak nabati berbahan dasar biji-bijian, dan tingkat proses pembuatan berkali-kali lipat lebih besar dari pada minyak nabati berbahan dasar biji-bijian. Hambatan utama dari industri sawit yakni perluasan lahan dengan cara pembakaran hutan tropis yang subur dan sejenisnya. Hal tersebutlah yang sulit dibantah oleh Pemerintah dan pelaku industri sawit di Indonesia.

1. Resolusi Sawit Uni Eropa

Pada 4 April 2017, Pemerintah Eropa mengeluarkan ketetapan mengenai kelapa sawit dan penghancuran hutan hujan. Tujuan akhir yaitu untuk melarang impor minyak sawit dan turunannya, yang tidak sesuai bagi infrastruktur berkelanjutan, ke UE di tahun 2020.²² Resolusi perusakan kelapa sawit dan hutan diusulkan dengan alasan bahwasanya pertumbuhan industri kelapa sawit merupakan asal sebab utama deforestasi serta perubahan iklim. Resolusi secara khusus menyebutkan Indonesia itu memperoleh 640 suara mendukung, 18 menolak dan 28 tidak memberikan suara. Resolusi tersebut dipandang sebagai tantangan bagi industri minyak sawit Indonesia, menyoroti beberapa masalah yang telah menjadi sorotan di Barat selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, resolusi tersebut menyerukan program biodiesel UE pada tahun 2020 untuk mengecualikan minyak sawit sebagai bahan baku. Dua bulan kemudian, pada Juni 2017, parlemen Norwegia mengeluarkan resolusi serupa, yang pada dasarnya meminta pemerintah Norwegia untuk melarang pemakaian minyak sawit juga semua turunannya, serta pengadaannya.

Resolusi Pemerintah Eropa tentang minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan menyatakan pertimbangan sebagai berikut:

“Recalls that Malaysia and Indonesia are the main producers of palm oil, with an estimated 85-90% of global production, and welcomes the fact that Malaysian primary forest levels have increased since 1990, but remains concerned that current deforestation levels in Indonesia are running at a rate of -0,5% total loss every five years”²³.

Resolusi tersebut menunjukkan adanya diskriminasi mengenai negara-negara produsen minyak sawit dan bertentangan dengan kedudukan UE tentang perdagangan bebas dan adil yang terbuka serta berdasarkan aturan.²⁴ Informasi dan data terkait perkembangan pengelolaan kelapa sawit dan kehutanan di negara

²² Windratmo Suwarno, “Kebijakan Sawit Uni Eropa Dan Tantangan Bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Hubungan Internasional*, 2019, <https://doi.org/10.18196/hi.81150>.

²³ European Parliament, “European Parliament Resolution of 16 February 2017 with Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics,” *European Parliament*, 2017.

²⁴ Sekar Wiji Rahayu and Fajar Sugianto, “Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439>.

produsen, termasuk Indonesia, tidak benar dan akurat serta tidak bertanggung jawab. Selain itu, resolusi tersebut mengabaikan sikap banyak pemangku kepentingan dan berisi komentar negatif tentang kelapa sawit. Antara lain, sawit merupakan masalah serius terkait korupsi, pekerja anak, pelanggaran hak asasi manusia, perampasan masyarakat adat, penggundulan hutan, dan perusakan habitat. Resolusi ini merekomendasikan perlunya berinvestasi dalam segala hal mulai dari minyak sawit hingga minyak biji bunga matahari dan kanola²⁵.

Usaha menghentikan perusahaan minyak sawit juga dilaksanakan melalui peraturan terpadu untuk sertifikasi minyak sawit di UE yang selanjutnya secara bertahap menghapus pemakaian minyak nabati yang telah menjadi sebab deforestasi dari tahun 2020. Resolusi tersebut tidak secara spesifik menyebut Indonesia, tetapi Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit tertinggi di dunia, disusul Malaysia, Thailand, Kolombia, serta berbagai negara penghasil lainnya. Deforestasi terjadi di hutan lindung, dan *Tree Cover Loss* (TCL) dapat disebabkan oleh aktivitas manusia atau kebakaran hutan dan bencana lainnya. Selain itu, berdasarkan data dari *World Resources Institute* (WRI), deforestasi menurun pada 2015-2016. Hal tersebut sesuai dengan data yang dihimpun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).²⁶ Dalam hal ini, menurut *Global Forest Watch* (GFW), TCL yang dihasilkan sebesar 2.422.128 hektare, namun di Indonesia sejak 2015 penurunan hutannya sudah berkurang 630.000 hektare atau seluas 1,1 juta hektare. Dalam hal ini, penilaian kebijakan kehutanan Indonesia terlalu sepihak dan politis.

Masalah deforestasi telah diumumkan oleh Komisi Eropa bahwa “*Recalls that Indonesia has recently become the third highest polluter of CO2 in the world and suffers from decreasing biodiversity, with several endangered wildlife species on the verge of extinction.*” Beralaskan studi Komisi Eropa 2013, penyebab utama deforestasi yakni sektor pertanian dimana meraih 58 juta hektar, sebaliknya kelapa

²⁵ Y. Sari and S. Suhadak, “Pengaruh Asean-China Free Trade Agreement (Acfta) Terhadap Ekspor Komoditi Kelapa Sawit Dan Karet Alam Indonesia Ke China (Studi Pada Trade Map Periode Tahun 2006-2014),” *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 2017.

²⁶ WRI, “Climate Analysis Indicators Tool (CAIT). Climate Data Explorer. 2017,” World Resources Institute, 2017.

sawit cuma merusak 6 juta hektar dari keseluruhan 239 juta hektar. Fakta ini menunjukkan bahwa sawit adalah penyebab utama keempat deforestasi sesudah kedelai dan jagung, menyumbang sekitar 2,5 persen dari deforestasi hutan global. Hanya saja, kita tidak seharusnya menutup mata mengenai laju perusakan hutan di Indonesia²⁷. Mayoritas deforestasi disebabkan karena perkebunan skala besar dan perusahaan pertambangan. Dalam waktu 10 tahun, antara 2000 dan 2010, perusahaan memiliki responsibilitas atas sekitar 88 persen dari total keseluruhan wilayah yang menjadi deforestasi, sementara konversi tanah petani hanya 11 persen.²⁸

2. Usaha Pemerintah Indonesia

Indonesia telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa atas pembatasan minyak sawit. Berikut adalah beberapa klaim pemerintah Indonesia yang membantah kampanye hitam UE: *pertama*, Penghasil emisi karbondioksida terbesar di dunia adalah gas rumah kaca, yang pada tahun 2011 menyumbang 92% dari emisi gas rumah kaca dunia; *kedua*, Sektor CO₂ terbesar merupakan konsumsi energi / bakal pembakar fosil global, yang menyumbang 56% dari keseluruhan, sebaliknya perluasan lahan hanya menyumbang 12,2%. *Ketiga*, Negara dengan emisi BBF tertinggi di dunia yaitu Cina, Rusia Amerika Serikat, Jepang, India, Kanada, Iran, Jerman, Afrika Selatan serta Inggris; *kempat*, Pengemis pertanian terbanyak di dunia yaitu India, Brazil, Cina, Argentina, Amerika Serikat, Uni Eropa; dan *kelima*, deforestasi cenderung terjadi di negara yang mempunyai hutan non tropis, sebaliknya pada negara yang mempunyai hutan tropis ada kecenderungan untuk meregenerasi hutan (reforestasi).²⁹

Bekerja sama dengan *Society for Epidemiology*, merupakan salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menyangkal *black campaign* yang

²⁷ European Commission, "European Resource Efficiency Platform - European Commission," *EC Directorate General ENVIRONMENT*, 2012.

²⁸ Seong Hoon Cho et al., "Effects of Changes in Forestland Ownership on Deforestation and Urbanization and the Resulting Effects on Greenhouse Gas Emissions," *Journal of Forest Economics*, 2014, <https://doi.org/10.1016/j.jfe.2013.10.002>.

²⁹ Steve Andrianto, "Sengketa European Union dan Republik Indonesia Pasal 26 RED II dan WTO," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 2020, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i01.2181>.

dilakukan Uni Eropa dalam hal penggunaan sawit. Duta Besar Indonesia untuk Uni Eropa, Arif Havas dalam seminarnya menyatakan bahwasanya perlunya masyarakat Indonesia selalu menekankan pentingnya meneliti dan mendistribusikan minyak sawit Indonesia secara global. Hal tersebut menjadi titik puncak kekecewaan Indonesia terhadap *black campaign* yang sering terjadi dan bahkan juga menjadi iklan TV di Eropa. Berbagai makanan terlebih memiliki ciri khas bebas dari penggunaan minyak sawit pada sampul merk kemasannya. Terlebih lagi, Riaz JP Saehu dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel melihat perlindungan Eropa sebagai bentuk kecemburuan terhadap kelapa sawit yang sulit tumbuh di Eropa namun tumbuh subur di tanah Indonesia. Oleh karena itu, beliau mendukung film kartun yang mempromosikan dukungannya terhadap minyak sawit. Film tersebut menceritakan fakta dimana supaya bisa membuat minyak nabati dibutuhkan 9 juta hektar luas lahan. Lahan tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan lokasi lahan yang digunakan untuk menanam bunga matahari, yakni 12 juta hektar. Sedangkan selama ini Eropa selalu menggunakan minyak bunga matahari sebagai *bio-oil*.³⁰

Meskipun keduanya merupakan tanaman *monokulture*, akan tetapi kelapa sawit dapat meresap lebih banyak CO₂ dibanding bunga matahari. Bersama dengan itu, emisi per kapita Indonesia adalah 1,8 meter per ton, sedangkan UE adalah 7,5 meter per ton. Hal tersebut digunakan sebagai sanggahan atas klaim bahwa minyak sawit memiliki efek rumah kaca. Ini membuktikan jumlah asap yang dikeluarkan di Eropa lebih tinggi dibandingkan di Indonesia yang dituding mendonasikan emisi lingkup besar akibat pemakaian minyak sawit untuk pertama kalinya.

3. Lobi Pemerintah RI Terhadap APEC

Pada KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC menganalisis tentang produk yang masuk dalam jenis ramah terhadap lingkungan dan tidak ramah terhadap lingkungan. Keputusan pada diskusi APEC disepakati dengan 54

³⁰ Andi Alatas, "Trend Produksi Dan Ekspor Minyak Sawit (CPO) Indonesia," *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 2015, <https://doi.org/10.18196/agr.1215>.

produk ramah terhadap lingkungan.³¹ Akan tetapi lucunya, minyak sawit dikategorikan sebagai produk tidak ramah lingkungan. Kelapa sawit kalah oleh tanaman bambu yang termasuk dalam 54 kategori produk ramah terhadap lingkungan. Dari hasil telaah logis tentang kelapa sawit juga bambu, rimpang tanamannya mirip, memiliki permeabilitas yang sama pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dan tumbuh pada suhu tropis, tetapi lahan sawit memiliki jangkauan yang lebih luas dalam hal tutupan dibandingkan bambu sebab tanaman sawit memiliki dahan dan daun yang lebih lebar. Penjelasan seperti itu tidak serta merta mampu membuat forum APEC setuju akan kelapa sawit sebagai salah satu produk ramah lingkungan³².

Bila penjabaran ilmiah seperti itu tidak dapat membuat minyak sawit masuk dalam daftar produk ramah lingkungan, perlu adanya upaya yang lebih agresif guna dalam melobi para pemimpin APEC untuk mengubah keputusan perihal minyak sawit. Selain itu, perjanjian APEC berada di luar ruang lingkup perjanjian WTO, yang mengatur perdagangan dunia, yang mencakup usulan kebijakan WTO tentang perdagangan yang adil³³. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mempertimbangkan kembali keputusan Forum APEC, yang dapat digunakan dalam upaya lobi para pemimpin APEC untuk memastikan keamanan industri kelapa sawit Indonesia. Sebagai hasil dari kesepakatan tersebut, para pemimpin APEC dapat melihat gambaran persaingan yang tinggi dalam bisnis minyak nabati global, lobi bambu yang sukses, dan nasib pohon sawit Indonesia.

4. Upaya *Joint Campaign*

Perlunya untuk melakukan kampanye bersama (*joint campaign*) oleh produsen minyak sawit terbesar di dunia, sebagaimana Indonesia juga Malaysia

³¹ Denada Faraswacyen Gaol, "Faktor Penghambat Diplomasi Cpo Indonesia Di Pasar Eropa," *Indonesian Journal of International Relations*, 2018, <https://doi.org/10.32787/ijir.v2i2.47>.

³² Muhammad Riza Febriano, Hariyadi Hariyadi, and A Roby Falatehan, "Strategi Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Sei Mangkei, Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit Terintegrasi Dan Berkelanjutan," *Jurnal Agrica*, 2017, <https://doi.org/10.31289/Agrica.V10i1.587>.

³³ Tuti Ermawati and Yeni Saptia, "Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 2013.

dalam mengganti pandangan negatif Eropa terhadap minyak sawit³⁴. Menurut GAPKI, RI tetap sebagai produsen CPO terbanyak didunia, dengan keseluruhan pembuatan tahun 2017 meraih 42,04 juta ton. Pasar ekspor menyumbang 31,05 juta ton dari total produksi³⁵.

Menurut Basiron & Yew (2016), pembuatan CPO Malaysia di tahun 2017 adalah 19,9 juta ton. Mengingat besarnya jumlah yang dikirim terbanyak yaitu dari kedua negara yang mana Negara Indonesia dan Malaysia, maka diperlukan sosialisasi penolakan terhadap minyak sawit dan tradisinya, kampanye bersama untuk bekerja sama secara erat dan serius, dan aksi serentak untuk memengaruhi pemungutan suara pada Pemerintahan Eropa, APEC dan WTO harus menurut tahapan untuk mengonversikan pendekatan mereka terhadap minyak sawit tanpa meninggalkan sokongan untuk produksi minyak nabati dalam negeri. Indonesia sedang bersiap menghadapi rencana Uni Eropa untuk secara bertahap menghapus bahan bakar nabati yang berasal dari kelapa sawit. Persiapan Indonesia diantaranya pembentukan *Council of Palm Oil Producers* (CPOPC) untuk menjalin kedudukan serentak dengan produsen minyak sawit, mencari pasar baru, menambahkan daya serap konsumsi minyak sawit dalam negeri, serta mengatur pasar yang tersedia.

Salah satu yang menarik dari usaha kampanye bersama tersebut adalah pertemuan antara Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia untuk melindungi stabilitas pengiriman minyak kelapa sawit serta mengambil tindakan terhadap kampanye negatif atas minyak sawit. Penghasil minyak sawit lingkup dunia dimohon mempunyai satu suara dalam menyusun kemufakatan untuk bersama-sama mendukung pengembangan industri sawit agar lebih tangguh dalam melawan serangan balik global atas minyak kelapa sawit. Sehingga tidak seperti sebelumnya yang telah terjadi, dimana menghadapi Uni Eropa yang sangat tangguh dan mempunyai suara yang sangat berdampak di kancah internasional.

³⁴ Fadhil Muhammad Indrapraja, "Analisis Terhadap Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Sebagai Instrumen Penaatan Hukum Lingkungan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2018, <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.61>.

³⁵ Hospes, "Marking the Success or End of Global Multi-Stakeholder Governance? The Rise of National Sustainability Standards in Indonesia and Brazil for Palm Oil and Soy."

D. Kesimpulan

Diskriminasi UE terhadap produk CPO Indonesia mewajibkan pemain di perindustrian minyak kelapa sawit dan pemerintah Indonesia untuk bergotong royong merancang serta mengembangkan usaha diplomatik intensif yang ditujukan kepada pemerintah UE dan rakyatnya. Usaha pemerintah Indonesia dalam menentang insentif UE atas pemakaian minyak sawit ialah 1) melakukan pengajuan klaim dan gugatan terhadap insentif UE untuk menolak pembatas minyak kelapa sawit, 2) Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pendistribusian minyak sawit Indonesia di lingkup dunia 3) Melaksanakan lobi terhadap pimpinan organisasi APEC untuk memastikan keamanan industri kelapa sawit Indonesia 4) Melakukan upaya *Join Campaign* oleh produsen minyak sawit terbesar di dunia untuk melindungi stabilitas pengiriman minyak kelapa sawit dan mengambil tindakan terhadap kampanye negatif atas minyak sawit, serta menyatukan suara dalam menyusun kemufakatan untuk bersama-sama mendukung pengembangan industri sawit agar lebih tangguh dalam melawan serangan balik global atas minyak kelapa sawit.

Daftar Pustaka

- Achmad, Aries Djaenuri, Tjahya Supriyatna, and Muchlis Hamdi. "Collaborative Governance in Renewable Energy Utilization." *International Journal of Science and Society*, 2020.
- Alatas, Andi. "Trend Produksi Dan Ekspor Minyak Sawit (CPO) Indonesia." *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 2015. <https://doi.org/10.18196/agr.1215>.
- Andrianto, Steve. "Sengketa European Union dan Republik Indonesia Pasal 26 RED II dan WTO." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 2020. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i01.2181>.
- Arifin, Bustanul, and Komang Audina Permana Putri. "Indonesian Government Strategies On Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access To European Union Countries Over The EU Parliament Resolution On Palm Oil And Deforestation Of Rainforest." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 2019. <https://doi.org/10.25077/ajis.8.2.201-221.2019>.
- Basiron, Yusof, and Foong-Kheong Yew. "The Burden of Rspo Certification Costs on Malaysian Palm Oil Industry and National Economy." *Environment & Health*, 2016.
- Cho, Seong Hoon, Heeho Kim, Roland K. Roberts, Taeyoung Kim, and Daegoon Lee. "Effects of Changes in Forestland Ownership on Deforestation and

- Urbanization and the Resulting Effects on Greenhouse Gas Emissions.” *Journal of Forest Economics*, 2014. <https://doi.org/10.1016/j.jfe.2013.10.002>.
- Damuri, Yose R., and Creina Day. “Survey of Recent Developments.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 2015. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1016565>.
- Ermawati, Tuti, and Yeni Saptia. “Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia.” *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 2013.
- European Commission. “European Resource Efficiency Platform - European Commission.” *EC Directorate General ENVIRONMENT*, 2012.
- European Parliament. “European Parliament Resolution of 16 February 2017 with Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics.” *European Parliament*, 2017.
- Febriano, Muhammad Riza, Hariyadi Hariyadi, and A Roby Falatehan. “Strategi Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Sei Mangkei, Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit Terintegrasi Dan Berkelanjutan.” *JURNAL AGRICA*, 2017. <https://doi.org/10.31289/agrica.v10i1.587>.
- Gaol, Denada Faraswacyen. “Faktor Penghambat Diplomasi Cpo Indonesia Di Pasar Eropa.” *Indonesian Journal of International Relations*, 2018. <https://doi.org/10.32787/ijir.v2i2.47>.
- Goyena, Rodrigo, and A.G Fallis. *Analisis Daya Saing Kelapa Sawit (CPO) Indonesia Di Pasar Internasional. Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.
- Habibie, A B. “Strategi Indonesia Dalam Mengatasi Black Campaign Sawit Untuk Meningkatkan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Periode Tahun 2007-2012.” *Global Dan Policy*, 2016.
- Hasan, Mohamad F., and Michael R. Reed. “An Analysis Of Factors Determining Competitiveness: The Case Of The Indonesian Palm Oil Industry.” *Jurnal Agro Ekonomi*, 2016. <https://doi.org/10.21082/jae.v19n1.2001.1-17>.
- Hinkes, Cordula. “Adding (Bio)Fuel to the Fire: Discourses on Palm Oil Sustainability in the Context of European Policy Development.” *Environment, Development and Sustainability*, 2020. <https://doi.org/10.1007/s10668-019-00541-y>.
- Hospes, Otto. “Marking the Success or End of Global Multi-Stakeholder Governance? The Rise of National Sustainability Standards in Indonesia and Brazil for Palm Oil and Soy.” *Agriculture and Human Values*, 2014. <https://doi.org/10.1007/s10460-014-9511-9>.
- Hudori, M. “Perbandingan Kinerja Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dan Malaysia.” *Jurnal Citra Widya Edukasi*, 2017.
- Indrapraja, Fadhil Muhammad. “Analisis Terhadap Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Sebagai Instrumen Penaatan Hukum Lingkungan.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2018. <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.61>.
- Nambiappan, Balu, Azman Ismail, Norfadilah Hashim, Nazlin Ismail, Dayang Nazrима Shahari, Nik Abdullah Nik Idris, Noraida Omar, Kamalrudin Mohamed Salleh, Nur Ain Mohd Hassan, and A. Kushairi. “Malaysia: 100

- Years of Resilient Palm Oil Economic Performance.” *Journal of Oil Palm Research*, 2018. <https://doi.org/10.21894/jopr.2018.0014>.
- Natashya, Jevon. “Hambatan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia Ke Uni Eropa Pasca Kebijakan Renewable Energy Directive (RED).” *Jurnal Sentris*, 2020. <https://doi.org/10.26593/sentris.v2i2.4185.127-155>.
- Nuryanti.s. “Nilai Strategis Industri Sawit.” *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 2008.
- Okano-Heijmans, Maaïke. “Changes in Consular Assistance and the Emergence of Consular Diplomacy.” *Diplomatic Studies*, 2011.
- Overdeest, Christine, and Jonathan Zeitlin. “Experimentalism in Transnational Forest Governance: Implementing European Union Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Voluntary Partnership Agreements in Indonesia and Ghana.” *Regulation and Governance*, 2018. <https://doi.org/10.1111/rego.12180>.
- Prasetya, Arus Reka. “Nation Branding: Komunikasi (Kenegaraan) Atau Komunikasi Pemasaran?” In *Conference on Communication and New Media Studies: Peran Dan Kontribusi Kajian Komunikasi Dalam Era Komunitas ASEAN*, 2015. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3692.2960>.
- Rahayu, Sekar Wiji, and Fajar Sugianto. “Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Biji Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439>.
- Robertua, Verdinand. “Environmental Diplomacy: Case Study of the Eu-Indonesia Palm Oil Dispute.” *Mandala Jurnal Hubungan Internasional*, 2019.
- Sari, Y., and S. Suhadak. “Pengaruh Asean-China Free Trade Agreement (Acfta) Terhadap Ekspor Komoditi Kelapa Sawit Dan Karet Alam Indonesia Ke China (Studi Pada Trade Map Periode Tahun 2006-2014).” *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 2017.
- Suwarno, Windratmo. “Kebijakan Sawit Uni Eropa Dan Tantangan Bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Hubungan Internasional*, 2019. <https://doi.org/10.18196/hi.81150>.
- . “The Challenge of Indonesian Diplomacy Against Palm Oil Discrimination.” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2019. <https://doi.org/10.26593/jihi.v15i2.3416.197-212>.
- Swandi, M. K., Periadnadi, and Nurmiati. “Isolasi Bakteri Pendegradasi Limbah Cair Industri Minyak Sawit.” *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 2015.
- Syahril, T. Zulham, Ishak Hasan, Jumadil Saputra, Helmi Noviar, and Okta Rabiana Risma. “Does the World Price of Crude Palm Oil and Total of Production Determine Palm Oil Marketing Margins in Indonesia.” *Industrial Engineering and Management Systems*, 2020. <https://doi.org/10.7232/iems.2020.19.3.520>.
- Tyson, Adam, and Eugenia Meganingtyas. “The Status of Palm Oil under the European Union’s Renewable Energy Directive: Sustainability or Protectionism?” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 2020. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1862411>.

- Woolcock, Stephen. *European Union Economic Diplomacy: The Role of the EU in External Economic Relations*. *European Union Economic Diplomacy: The Role of the EU in External Economic Relations*, 2012. <https://doi.org/10.1080/14782804.2012.737680>.
- WRI. "Climate Analysis Indicators Tool (CAIT). Climate Data Explorer. 2017." World Resources Institute, 2017.